

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perilaku Golput

1. Pengertian Perilaku Golput (*Non Voting Behaviour*)

Golput dimaknai sebagai perilaku apatisme (jenuh) dengan tema-tema pemilihan, definisi tersebut menjelaskan bahwa Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilgub, pilkada dan bahkan pilkades. Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali. Golput merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat terhadap seputar pemilu baik janji politik, money politik dan kekerasan politik dan kondisi-kondisi yang tak kunjung membaik (Soebagio, 2018).

Pada perkembangan berikutnya, golput dimaknai sebagai protes dalam bentuk ketidak hadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau keengganan menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan sengaja menusuk tepat dibagian putih kertas suara dengan maksud agar surat suara menjadi tidak sah, dan dengan tujuan agar kertas suara tidak disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula (Muhammad Asfar, 2004)

Sementara itu (Priyatmoko, 1992) mengartikan golput sebagai keengganan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada even pemilu baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun kepala daerah disebabkan rasa kecewanya pada sistem politik dan pemilu yang tak banyak memberikan perubahan apapun bagi kehidupan masyarakat.

Dari pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa golput adalah pilihan tidak memilih sebagai bentuk akumulasi rasa jenuh (apatis) masyarakat yang nyaris setiap tahun mengalami pemilihan kepala daerah.

Golput juga sebagai reaksi atau protes atas pemerintahan dan partai-partai politik yang tidak menghiraukan suara rakyat, perlawanan terhadap belum membaiknya taraf kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, politik, hukum dan buday. Golput merupakan respon atas ketidakmampuan partai atau penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang telah menerima mandat.

2. Sejarah Perilaku Golput

Pada masa orde baru, penguasa bercorak militeristik begitu kuat, kelompok *civil society* tak berdaya membendung berbagai kebijakan tak populis. Kondisi demikian mendorong sekelompok intelektual yang dikomandoi Arif Budiman untuk menentang ketidakadilan struktural lewat gerakan moral. Gerakan moral ini kemudian dikenal dengan golongan putih (golput) yang dicetuskan pada 3 Juni 1971, sebulan menjelang pemilu.

Pada awalnya golput merupakan gerakan untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun. Gerakan itu lahir didorong oleh kenyataan bahwa dengan atau tanpa pemilu, sistem politik waktu itu tetaplah bertopang kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lebih-lebih dengan berbagai cara, penguasa melindungi dan mendorong kemenangan Golongan Karya (Golkar), sehingga meminggirkan partai politik lain yang berjumlah 10 kontestan untuk dapat bertanding merebut suara secara fair. Jadi, dalam konteks ini, cikal bakal golput merupakan gerakan moral yang ditujukan sebagai “mosi tidak percaya” kepada struktur politik yang coba dibangun oleh penguasa waktu itu. Gerakan moral ini memberikan kesan pada publik bahwa putih dibandingkan dengan lawannya, yakni hitam, kotor.

Menurut (Varma, 2001) terjadinya golput dinegara berkembang seperti Indonesia lebih disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme. “Di negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradox demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi”.

Penyataan menunjukkan bahwa secara empirik peningkatan angka Golput tersebut terjadi antara lain oleh realitas sebagai berikut: Pertama, pemilu belum mampu menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki platform politik yang realistis dan kader politik yang berkualitas serta komitmen politik yang berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya. Ketiga, merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan/kedudukan daripada memperjuangkan aspirasi publik. Keempat, tidak terealisasinya janji-janji yang dikampanyekan elit politik kepada publik yang mendukungnya. Kelima, kejenuhan pemilih karena sering adanya

Pemilu/Pilkada yang dipandang sebagai kegiatan seremonial yang lebih menguntungkan bagi para elit politik. Keenam, kurang netralnya penyelenggara Pemilu/Pilkada yang masih berpotensi melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu, di samping juga kurangnya intensitas sosialisasi Pemilu secara terprogram dan meluas.

3. Aspek-aspek Perilaku Golput

Gandung (dalam Ismanto, 2008) menyebutkan bahwa aspek – aspek golput;

a. Apatisme politik,

Apatisme politik yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkaitan dengan persoalan politik dan kelebagaannya. Apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkait dengan persoalan politik dan kelebagaannya (Saptamaji,2005). Definisi tersebut menunjukkan bahwasanya apatisme merupakan sikap acuh tak acuh terhadap sebuah hal, dalam hal ini adalah politik.

Apatisme masyarakat terhadap politik dilatari oleh dua aspek yaitu rendahnya kepercayaan terhadap politik yang berlangsung dan rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik. Apatisme masyarakat bukanlah merupakan tindakan parsial yang tidak terhubung dengan struktur namun merupakan dampak dari struktur yang ada sebagai bentuk protes maupun keputusan terhadap politik yang berlangsung di negaranya.

Dalam kasus apatisme masyarakat terhadap politik khususnya di Indonesia, hal ini terjadi melalui reproduksi wacana dan kesenjangan antara masyarakat dan elit politik. Banyak hal yang melatarbelakangi munculnya apatisme masyarakat tersebut sebagai turunan dari kedua aspek penyebab apatisme politik diatas. Apatisme masyarakat di indonesia bukan hanya muncul dari rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap agenda politik karena telah terbukti pada setiap pemilihan umum baik itu pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum nasional, masyarakat tetap memilih.

Apatisme masyarakat di Indonesia mengambil bentuk ketidakacuhan masyarakat terhadap perkembangan politik dengan memvisualisasikan politik sebagai permainan kotor sedangkan dalam ajang pemilihan umum, masyarakat sebagai pemilih cenderung hanya melakukan ritual demokrasi dengan datang memberikan suara tanpa mempertimbangkan pilihannya dengan baik.

b. Sinisme politik

Sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atau tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang - orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politisi tak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah. Sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politisi tak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah (Alifa Syadza).

Definisi di atas sejalan dengan pengamatan Simmel, bahwa manusia modern telah menjadikan uang sebagai tujuan utama, padahal sebetulnya uang hanya merupakan sarana. Bersamaan dengan itu, muncullah dampak-dampak negative terhadap individu, seperti sinisme. Dampak ekonomi lainnya adalah reduksi nilai-nilai dalam kehidupan manusia, misalnya banyak manusia yang menilai sesuatu banyak berdasarkan uang, dan menganggap uang adalah segala-galanya. Selain menunjukkan dampak negatif dari fenomena uang, Simmel juga menegaskan semua yang terkait dengan uang termasuk dampak negativenya juga tergantung pada manusia itu sendiri. Akan tetapi dia juga mengatakan bahwa uang hanyalah sarana, bukan tujuan utama.

Jadi secara garis besar, dalam karyanya *Philosophy Of Money* Simmel mencoba menganalisis mengenai pengaruh adanya uang sebagai alat tukar terhadap perubahan gaya hidup manusia. Sebab utama meningkatnya kesenjangan ini adalah meningkatnya pembagian kerja di masyarakat modern. Meningkatnya spesialisasi dalam kehidupan masyarakat mengarah pada perbaikan kemampuan untuk menciptakan beragam komponen dunia budaya. Namun, pada saat yang sama, individu yang terspesialisasi kehilangan pemahaman tentang kebudayaan total dan kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya.

c. Alienasi

Alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa (M. Rolip Saptamaji).

Definisi diatas menjelaskan bahwa Konsep alienasi politik merupakan lawan dari konsep keterikatan atau hubungan politik yang terjadi

antara masyarakat dengan negara. Konsep alienasi tersebut memiliki berbagaimacam aspek sebagai pemunculannya yaitu ketidakmampuan, sikap apatis, sinisme dan ketidak senangan terhadap politik.

The concept of alienation originates from the concept of entfremdung used by Marx and by Weber. In political sociology, political alienation has come to refer to the opposite of "political engagement" of any kind, and to include various aspects of inefficacy, apathy, cynicism, and displeasure (Citrin et al., 1975, Mason et al., 1985)

Alienasi politik menjauhkan masyarakat dari politik dan pemerintahan sehingga memunculkan kekecewaan dan keputusan terhadap politik di masyarakat. Sementara, tidak semua politisi dirugikan oleh kurangnya legitimasi masyarakat terhadap kekuasaan. Dalam oligarki, legitimasi tidaklah diperlukan. Masyarakat yang acuh tak acuh pada setiap agenda politik nasional maupun daerah dapat ditempatkan sebagai floating massa yang hanya diaktifkan dimasa pemilihan. Bagi demokrasi prosedural, aktifitas legal formal demokrasi sangatlah penting namun tidak mencakup substansinya. Hal ini akan bersinergi dengan ketidak acuhan masyarakat, ketika para elit tidak dapat menyampaikan aspirasi masyarakat ataupun tidak lagi menepati janjinya semasa kampanye masyarakat pun hanya kecewa tanpa tindakan protes ataupun upaya advokasi politik bagi kebijakan yang bertentangan dengan masyarakat. Pada akhirnya, status quo akan terus bertahan dan oligarki pun akan tercipta di negara tersebut tanpa disadari oleh masyarakat.

d. Anomi

Anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Definisi tersebut sejalan dengan penjelasan Durkheim dalam bukunya yang berjudul *the Duvisuon of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatnya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.

Penelitian Masitoh.dkk (2013) menyebutkan beberapa aspek terkait perilaku golput yaitu :

- a. Aspek teknis , dari hasil penelitian ini seseorang berperilaku golput dilihat dari adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih.
- b. Aspek politis, pada aspek politis perilaku golput mempunyai alasan seperti tidak percaya akan adanya perubahan yang lebih baik.
- c. Aspek identitas , jika dilihat dari aspek ini perilaku golput seseorang bisa dilihat dari agama , tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin dan lain-lain.

Menurut Rose dan Alliser (dalam Khasanah, 2016) Pendekatan mazhab psikologis ini menekankan kepada faktor variabel psikologis sebagai telaah utama untuk melihat perilaku memilih yakni :

- a. Ikatan emosional pada suatu partai politik (identifikasi partai) , rasa ketertarikan individu terhadap partai meskipun individu bukan anggota partai.
- b. Orientasi terhadap isu yang berkembang , yaitu rasa ketertarikan dengan tema-tema atau visi misi yang diusung oleh kandidat
- c. Orientasi terhadap kandidat, sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat, baik dalam masa lalu kandidat, baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Berdasarkan beberapa aspek yang disebutkan beberapa tokoh diatas, peneliti menggunakan pendapat Rush dan Althoff (dalam S. Zulian Dkk, 2017) yang menyatakan bahwa aspek perilaku golput adalah Apatisme, Sinisme, Alienasi, Anomi, dan Registered Not Vote hal itu karena aspek yang dikemukakan Michael Rush dan Philip Althoff (dalam, S. Zulian. Dkk, 2017) sesuai dengan sikap pemilih pemula terhadap isu politik di indonesia.

4. Tujuan Perilaku Golput

Bagi pendukung golput, perilaku tidak memilih bagian dari tindakan yang memiliki pesan. Karenanya golput bukan tanpa tujuan, golput menjadi alat protes politik yang tidak sempat tersuarakan, akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap realitas politik yang dilihat kemudian disalurkan melalui sikap apatis terhadap pemilu. Sebab itu, melihat golput harus dapat mengkontekstualisasikan dengan keadaan dan realitas yang berkembang. Interpretasi perilaku politik tidak dapat diserahkan pada penjelasan teoritis semata.

Maka perilaku golput sejujurnya secara umum dimaksudkan sebagai simbol protes atas sistem yang tidak adil, sistem yang hanya menguatkan

posisi kelompok minoritas (elit) dan mengabaikan substansi demokrasi yang bertujuan membangun peradaban masyarakat yang lebih baik. Yang terpenting lagi adalah golput ditujukan pada tiadanya amanah dari elit dan pemimpin bangsa dalam menjalankan roda kekuasaannya. Protes tersebut ditujukan pada pemerintah yang korup dan tidak akuntabel. Maka kondisi demikian menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat luas. Pendukung golput tidak hanya berasal dari satu garis partai, melainkan seluruh partai dan organ-organ sosial. Semuanya melihat dengan jelas betapa masif retorika politik yang dibangun untuk mengelabui rakyat. Karenanya parlemen dan pemerintah dinilai penyebab lahirnya diskriminasi sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya di negara ini.

B. Kepercayaan politik

1. Pengertian kepercayaan politik

Menurut Colcuit dkk, (2007) kepercayaan dapat diartikan sebagai keinginan untuk menerima risiko terhadap *trust* (individu atau lembaga) berdasarkan harapan positif atas aksi yang dimilikinya. Kepercayaan politik menyangkut pandangan orang mengenai hal-hal yang dihasilkan oleh sebuah sistem seperti politisi, sistem politik dan institusi-institusi. Sementara Hetherington,(1998) mengatakan bahwa kepercayaan politik merupakan sebagai orientasi evaluatif masyarakat terhadap sistem politik atau bagian dari sistem tersebut berdasarkan pada harapan normatif. Dengan kata lain, kepercayaan politik tidak hanya berhenti pada rasa percaya terhadap pemerintah, namun juga terhadap elemen-elemen yang melekat padanya. Dengan demikian, kepercayaan politik dapat didefinisikan sebagai keyakinan rakyat terhadap kinerja pejabat publik maupun institusi pemerintahan.

Habib dalam (Rohana,dkk 2008) *political trust* atau kepercayaan politik adalah merupakan buah pikiran nasional (seluruh warga negara) atau hasil konsensus dari sebuah kontrak sosial dalam sejarah awal didirikannya sebuah negara.

Paige dalam (Rohana 2008) *political trust* atau kepercayaan politik yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintahan dan sistem politik yang ada, apakah dapat dipercaya atau dapat dipengaruhi atau tidak.

2. Faktor-faktor Kepercayaan Politik

Menurut Wong, dkk., (2011) ada dua faktor yang mempengaruhi kepercayaan politik, yakni ; Pertama, faktor institusi, yang berkaitan dengan ekonomi dan *performance* dari pemerintah dan lembaga politik. ; Kedua, faktor budaya yang meliputi faktor sosiologis, psikologis. Menurut Christensen dan Lægreid (dalam Wong, dkk., 2011) budaya politik dan socio demografi variabel seperti, umur, pendidikan dan pekerjaan berperan dalam membentuk kepercayaan politik. Kepercayaan politik juga berkaitan dengan pengalaman positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki pengalaman positif berkaitan pelayanan yang diberikan institusi publik akan memiliki kepercayaan tinggi terhadap institusi publik tersebut (Christenson & Laegreid, 2003).

Menurut Giddens (dalam Ancok, 2007) ada beberapa alasan yang mempengaruhi kepercayaan politik masyarakat, di antaranya : a. Masyarakat terbebas dari penindasan (opresi), banyak penindasan yang terjadi di dalam masyarakat. Antara lain adalah penindasan para pengusaha pada rakyatnya, penindasan oleh pemilik modal pada mereka yang tidak bermodal, dan sebagainya. Kepercayaan politik masyarakat akan terbangun dengan sendirinya apabila masyarakat terbebas dari penindasan-penindasan tersebut ; b. Masyarakat terbebas dari rasa takut, kebebasan akan rasa takut tersebut meliputi bebas dari rasa takut akan diculik hukum, atau dihabiskan nyawaya oleh oknum negara, dikarenakan oleh perbedaan pendapat dengan pihak penguasa. Bebas dari rasa takut akan teror yang ditebarkan oleh pihak lain pada anggota masyarakat yang dianggap berbeda pandangan politik, kepercayaan dan agama. Bebas dari rasa takut akan ancaman dari suku, agama atau kelompok lain yang berbeda ; c. Masyarakat terbebas dari perlakuan diskriminatif di muka hukum maupun hak-hak pribadi, salah satu tugas pemerintah adalah membangun komitmen pada kebersamaan dengan menghilangkan diskriminasi berdasarkan ikatan primordial. Tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, politik, dan agama. Selain itu tidak ada diskriminasi dalam pemberian kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendidikan. Diskriminasi adalah sebuah tindakan tidak adil yang akan membuat orang merasa tidak memiliki negara ini. Bila tindakan diskriminasi ini terus ada maka jangan harap masyarakat akan terlibat dalam pembangunan, apalagi memiliki kepercayaan terhadap politik (pemerintah) ; d. Pemerintahan yang transparan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kegiatan pemerintah, penganggaran dan kemana dana dihabiskan. Pemerintah harus

transparan terhadap segala penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan memberi kebebasan terhadap pers sebagai alat kontrol untuk membuka informasi secara transparan kepada masyarakat ; e. Pemerintah yang bermitra dengan masyarakat, kegairahan anggota masyarakat di dalam kegiatan pembangunan yang konstruktif ditentukan oleh sejauh mana mereka diajak berpartisipasi sebagai mitra, sejak pelaksanaan pembangunan sampai pada pelaksanaan serta evaluasi hasilnya. Selain itu, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sejak perencanaan sampai dengan evaluasi hasil pembangunan akan menimbulkan rasa memiliki pembangunan (*sense of ownership*) ; f. Kepedulian pemerintah kepada masyarakat (*caring*), kepedulian (*caring*) adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh siapa saja. Kepedulian ini dinyatakan pada kepedulian atas sesama, kepedulian si kaya pada si miskin, kepedulian mereka yang memiliki kesempatan pada kekuasaan atas mereka yang tidak memilikinya.

Kepercayaan masyarakat terhadap politik hanya akan terbentuk jika pemerintah mampu merealisasikan harapan-harapan masyarakat tentang kesejahteraan, keamanan, kepedulian, keadilan dan bebas dari masalah mendasar yang belum juga teratasi. Janji-janji dalam propaganda politik tidak mampu membentuk kepercayaan masyarakat terhadap politik (institusi pemerintah).

3. Aspek-aspek kepercayaan politik

Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat yang tunjukan oleh prilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini, sehingga aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif dan hubungan hubungan bersifat kerjasama. Muluk (dalam Rohana 2008) menyebutkan beberapa indikator sikap dan perilaku kepercayaan politik (*political trust*), diantaranya : **a** patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku ; **b** berpartisipasi dalam kegiatan politik ; **c** persepsi positif terhadap pemerintah ; **d** aktif dalam organisasi pemerintah.

Ikhuijsen dan Knies, (2015) membagi kepercayaan politik ke dalam tiga aspek atau dimensi, yaitu *perceived competence*, *perceived benevolence*, dan *perceived integrity*.

- a. *Perceived competence*, merupakan persepsi rakyat terhadap kemampuan pemerintah atau pelayan publik untuk melaksanakan perannya secara efektif, terampil, dan profesional.

- b. *Perceived benevolence*, merupakan persepsi rakyat bahwa pemerintah atau pelayan publik peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan termotivasi untuk mengambil tindakan atau kebijakan atas kepentingan rakyat.
- c. *Perceived integrity*, merupakan persepsi rakyat bahwa pemerintah atau pelayan publik yang terpilih tulus, jujur, dan memenuhi janji-janji politiknya.

Beberapa indikator diatas, peneliti menggunakan indikator untuk mengukur kepercayaan politik seseorang. a). Patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, b). berpartisipasi dalam kegiatan politik, c). persepsi positif terhadap pemerintah dan aktif dalam organisasi pemerintah, merupakan alat untuk mengukur sejauh mana kepercayaan seseorang terhadap politik.

4. Membangun Kepercayaan Politik

Menurut Reynolds (dalam Ancok, 2007) pada dasarnya upaya membangun sebuah kepercayaan politik, harus dimulai dengan membangun sistem yang bercirikan adanya: a. Kompetensi, kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan tugas yang diperankan pada seseorang. Seorang menteri atau anggota DPR atau pejabat baru akan dipercaya oleh masyarakat yang dipimpinnya apabila mempunyai kompetensi di bidang yang menjadi tugasnya ; b. keterbukaan atau sifat transparansi untuk tidak menutup-nutupi informasi tentang apa yang dilakukan oleh seseorang dalam urusan negara dan berbangsa sebagai syarat mutlak untuk tumbuhnya sebuah kepercayaan ; c. Realiabilitas, realiabilitas terlihat dari sejauhmana keselarasan anatara ucapan dan perbuatan ; d. Keahlian, perlakuan adil adalah dambaan masyarakat, rakyat mengharap pemimpin yang adil.

Kepercayaan harus dibangun oleh semua pihak pada setiap institusi kehidupan, mulai dari institusi keluarga, pendidikan serta institusi masyarakat dan institusi pemerintahan dengan visi dan komitmen bersama, maka kepercayaan itu bisa dibangun.

C. Persepsi Dinasti Politik

1. Pengertian Persepsi Dinasti Politik

Dinasti politik dimaknai sebagai upaya seorang penguasa atau pemimpin baik di tingkat presiden/bupati/walikota yang telah habis masa jabatannya, untuk menempatkan keluarganya sebagai calon penggantinya atau penerus penguasa sebelumnya untuk periode berikutnya (Soemiarno, 2010). Dengan kata lain, politik dinasti mengarah kepada suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (misalnya keluarga elite) yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan.

Guardetal,(2016) dinasti politik merupakan sumber kekuatan politik yang dimiliki oleh dinasti tertentu dan merupakan keuntungan bagi kelompok.

Djati (2013), kemunculan dinasti politik dapat terindikasi dalam beberapa penjelasan. Pertama, kegagalan fungsi partai politik local untuk melakukan regenerasi politik. Kedua, biaya demokrasi yang tinggi menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suksesi kekuasaan. Ketiga, perimbangan kekuasaan antar elit local di kalangan elit tertentu yang berkembang menjadi dinasti.

Menurut (Hermansyah, 2017) komponen dinasti politik dibagi menjadi beberapa hal yaitu :

- a. Kedekatan personal dalam hubungan kemasyarakatan dengan penguasa.
- b. Pengetahuan masyarakat tentang dinasti politik.
- c. Pemahaman masyarakat adanya faktor pendukung kuatnya dinasti politik.
- d. Kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari penerapan dinasti politik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi dinasti politik adalah pandangan dan pengertian atau proses penyatuan dari individu terhadap stimulus yang diterima seseorang terhadap regenerasi jabatan publik yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan.

Slameto (2010) mengemukakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan dilakukan yaitu dengan inderanya, yaitu indera pengelihatan, pendengaran, peraba, dan penciuman. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yang disebut indera. Indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya (Walgito, 2004). Lebih lanjut Walgito menjelaskan bahwa persepsi merupakan stimulus yang diinderakam oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera.

Moskowitz dan Orgel (dalam Walgito, 2004) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses penyatuan dari individu terhadap stimulus yang diterimanya, dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme, sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas penyatuan dalam diri individu. Hal tersebut karena persepsi merupakan aktivitas yang disatukan, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu.

Dikatakan oleh Drever (196) persepsi adalah proses mengenal peristiwa-peristiwa dengan menggunakan indera. Hal ini dimungkinkan karena objek persepsi dapat berwujud pada benda-benda konkrit maupun manusia dengan segala perbuatannya. Persepsi terhadap sikap perbuatan disebut sebagai tanggapan, sedangkan persepsi terhadap benda-benda konkrit diartikan sebagai kegiatan mengamati. Oleh karena itu sebenarnya setiap individu secara sadar maupun tidak sadar melakukan persepsi terhadap hal-hal yang ada disekitarnya.

Gibson dkk (1989) menyatakan bahawa persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya terhadap obyek. Gibson dkk (1989) juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.

Menurut Sugihartono (2007) “Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan / menginterpretasi stimulus yang masuk kedalam alat indera”. Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan (Sunaryo, 2004).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses di mana seseorang menyimpulkan suatu pesan atau informasi yang berupa peristiwa atau pengalamannya. Penerimaan pesan ini dilakukan dengan panca indera yang dimilikinya.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Pada proses persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu stimulus atau objek tertentu. Tepat atau tidaknya penilaian tersebut tergantung oleh individu dan objek yang dipersepsikannya. Menurut Branca, Woodworth dan Marquis (dalam Walgito, 2004) menjelaskan bahwa alat indera merupakan penghubung antar individu dengan dunia luarnya. Secara sederhana persepsi terjadi apabila suatu objek diterima oleh indera, kemudian stimulus tersebut dilanjutkan oleh saraf sensorik menuju ke otak sebagai pusat susunan saraf, di dalam otak tersebut akan dapat memberikan penilaian terhadap objek yang dirasakan melalui indera.

Menurut Parek (1984) proses persepsi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : **a.** Penerimaan rangsangan. Pada proses ini, individu menerima rangsangan dari berbagai sumber, seseorang lebih senang memperhatikan salah satu sumber dibandingkan dengan sumber lainnya, apabila sumber tersebut mempunyai kedudukan yang lebih dekat atau yang lebih menarik baginya ; **b.** Proses menyeleksi rangsangan. Setelah rangsangan diterima kemudian diseleksi disini akan terlihat proses perhatian. Stimulus itu diseleksi untuk kemudian diproses lebih lanjut ; **c.** Proses pengorganisasian. Rangsang yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk ; **d.** Proses penafsiran. Setelah rangsangan atau data diterima dan diatur, si penerima kemudian menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Setelah

data tersebut dipersepsikan maka telah dapat dikatakan sudah terjadi persepsi. Karena persepsi pada pokoknya memberikan arti kepada berbagai informasi yang diterima ; e. Proses pengecekan. Setelah data ditafsir si penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah yang dilakukan benar atau salah. Penafsiran ini dapat dilakukan dari waktu ke waktu untuk menegaskan apakah penafsiran atau persepsi dibenarkan atau sesuai dengan hasil proses selanjutnya ; f. Proses reaksi. Lingkungan itu belum sempurna menimbulkan tindakan-tindakan itu biasanya tersembunyi atau terbuka.

Schermerhorn, (1994) proses persepsi secara umum terbagi dalam 4 tahap, yaitu :

a) Perhatian dan seleksi (*Attention and Selection*)

Pemilihan informasi secara selektif hanya memberikan kesempatan pada proporsi yang kecil dari seluruh informasi yang ada. Proses seleksi ini berasal dari proses terkontrol, yaitu individu secara sadar memutuskan informasi mana yang akan diperhatikan dan mana yang akan diabaikan.

b) Organisasi (*Organization*)

Pada tahap ini, seluruh informasi yang telah masuk seleksi pada tahap sebelumnya akan diorganisasikan. Adapun cara untuk mengorganisasi informasi secara efisien adalah *schema*. *Schema* adalah kerangka kognitif yang menggambarkan pengetahuan yang diorganisasi dengan pemberian konsep atau stimulus yang dibangun melalui pengalaman.

c) Interpretasi (*Interpretation*)

Setelah perhatian digambarkan pada stimulus tertentu dan informasi telah diorganisasi, maka individu akan mencoba untuk memperoleh jawaban tentang makna dari informasi tersebut. Tahap ini sangat dipengaruhi oleh *causal attribution*, yaitu sebuah percobaan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan seperti itu.

d) Pencarian Kembali (*Retrieval*)

Informasi yang telah tersimpan dalam sebuah memori harus dicari kembali bila informasi tersebut digunakan. Individu akan lebih mudah mendapatkan kembali informasi yang telah tersimpan bila telah terskema dan terorganisir dengan baik.

Dari uraian tersebut maka persepsi dapat dikatakan proses persepsi diawali dengan menerima rangsangan dari berbagai sumber, rangsang kemudian diseleksi, selanjutnya diorganisasikan dalam bentuk, kemudian ditafsirkan, setelah data ditafsir penerima mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah yang dilakukan benar atau salah, kemudian menimbulkan tindakan-tindakan itu biasanya tersembunyi atau terbuka.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang dengan orang lain terhadap obyek yang sama dapat berbeda, hal tersebut karena situasi dan kondisi pribadi individu ikut berperan dalam proses persepsi. Persepsi juga menafsirkan stimulus yang telah ada didalam otak. Alat untuk menerima serupa pada setiap individu, namun interpretasinya yang berbeda. Perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : a. Kemampuan dan keterbatasan fisik dari alat indera dapat mempengaruhi persepsi untuk sementara waktu ataupun permanen ; b. Kondisi lingkungan ; c. Pengalaman masa lalu, bagaimana cara individu untuk menginterpretasikan atau bereaksi terhadap suatu stimulus tergantung dari pengalaman masa lalunya ; d. kebutuhan dan keinginan. Ketika seorang individu membutuhkan atau menginginkan sesuatu maka ia akan terus berfokus pada hal yang dibutuhkan dan diinginkannya tersebut ; e. Kepercayaan, prasangka dan nilai. Individu akan lebih memperhatikan dan menerima orang lain yang memiliki kepercayaan dan nilai yang sama dengannya. Sedangkan prasangka dapat menimbulkan bias dalam mempersepsi sesuatu.

Sedangkan menurut Chaplin,(1999) persepsi secara umum bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, keadaan jiwa atau suasana hati dan faktor-faktor motivasional. Maka arti suatu objek atau satu kejadian objektif ditentukan baik oleh kondisi perangsang maupun faktor-faktor organisme. Dengan alasan sedemikian, persepsi mengenai dunia oleh pribadi-pribadi yang berbeda juga akan berbeda karena setiap individu menanggapinya berkenaan dengan aspek situasi tadi yang mengandung arti khusus sekali bagi dirinya.

Kreich dan Crutchfield (dalam Rakhmat, 2005) menyebutkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-

faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli itu. Sedangkan faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Menurut teori Gestalt, bahwa bila kita mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan, kita tidak melihat bagian-bagiannya lalu menghimpunya.

Menurut Gibson, dkk (dalam Jenny, 2012), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu : Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

a. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :

- 1) Fisiologis Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.
- 2) Perhatian Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.
- 3) Minat Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
- 4) Kebutuhan yang Searah Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
- 5) Pengalaman dan Ingatan Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian

lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

6) Suasana Hati

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, *mood* ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

Faktor internal pada intinya berupa fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman, suasana hati seseorang yaitu tokoh masyarakat sangat mempengaruhi dalam terjadinya persepsi, karena hubungan akan hal ini sangat berkaitan erat, walaupun pada kenyataannya semua juga tergantung objek (remaja hamil di luar nikah) dan tergantung energi yang digunakan tokoh masyarakat ketika melihat hal tersebut.

b. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :

a) Ukuran dan Penempatan dari Obyek atau Stimulus

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

b) Warna dari Objek-Objek

Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.

c) Keunikan dan Kekontrasan Stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

d) Intensitas dan Kekuatan dari Stimulus

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi.

e) *Motion* atau Gerakan

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam.

Dari uraian berbagai teori diatas dapat disimpulkan, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dikategorikan menjadi dua bagian yakni, faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Sedangkan faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu.

Menurut Baihaqi (2007) secara umum ada beberapa ciri persepsi anatara lain:

1. Bahwa persepsi timbul secara seponatan pada manusia, yaitu ketika seseorang berhadapan dengan dunia penuh dengan rangsang indra manusia menerima 3 milyar perdetik, 2 milyar diantaranya diterima oleh mata.
2. Persepsi merupakan sifat paling asli, merupakan titik tolak perbuatan kesadaran.
3. Dalam persepsi tidak selalu dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin hanya sebagian, sedangkan yang lain cukup dibayangkan.
4. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman berarti dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.
5. Manusia sering tidak teliti sehingga ia sering keliru, ini terjadi karena sering ada penipuan dibidang persepsi seperti ilusi persepsi.
6. Persepsi seringkali ada yang dipelajari dan sebagian ada yang bawaan.

7. Dalam persepsi, sifat benda yang dihayati biasanya bersifat permanent dan setabil.
8. Persepsi bersifat prspektif, artinya mengandung harapan
9. Kesalahan persepsi bagi orang normal, ada cukup waktu untuk mengkoreksi, berbeda dengan orang yang terganggu jiwanya.

4. Aspek-Aspek Persepsi Dinasti Politik

Menurut Baihaqi (2007) secara umum ada beberapa ciri persepsi anatara lain:

1. Bahwa persepsi timbul secara seponatan pada manusia, yaitu ketika seserang berhadapan dengan dunia penuh dengan rangsang indra manusia menerima 3 milyar perdetik, 2 milyar diantaranya diterima oleh mata.
2. Persepsi merupakan sifat paling asli, merupakan titik tolak perbuatan kesadaran.
3. Dalam persepsi tidak selalu dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin hanya sebagian, sedangkan yang lain cukup dibayangkan.
4. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman berarti dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.
5. Manusia sering tidak teliti sehingga ia sering keliru, ini terjadi karena sering ada penipuan dibidang persepsi seperti ilusi persepsi.
6. Persepsi seringkali ada yang dipelajari dan sebagian ada yang bawaan.
7. Dalam persepsi, sifat benda yang dihayati biasanya bersifat permanent dan setabil.
8. Persepsi bersifat prspektif, artinya mengandung harapan

Kesalahan persepsi bagi orang normal, ada cukup waktu untuk mengkoreksi, berbeda dengan orang yang terganggu jiwanya.

Menurut Allport (1991), aspek-aspek persepsi ada tiga yaitu :

a) Komponen Kognitif

Yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek sikap tersebut.

- b) **Komponen Afektif**
Yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi, sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau *system* nilai yang dimilikinya.
- c) **Komponen Konatif**
Yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya.

Menurut Walgito (1989) ada beberapa hal yang diperlukan agar persepsi dapat disadari oleh individu yaitu :

- a) **Adanya objek yang dipersepsikan.**
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau *reseptor* stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (*reseptor*), dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (*sensoris*) yang bekerja sebagai *reseptor*.
Alat indera atau *reseptor*. Yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang di terima *reseptor* ke pusat syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- b) **Adanya perhatian.**
Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi terhadap sesuatu diperlukan adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu kesiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.

Hamka (dalam Ernita, 2014) menyebutkan indikator mengenai persepsi yaitu :

- a. Menyerap, yaitu stimulus yang diluar individu diserap melalui indera, masuk ke otak dan mendapat tempat. Disitu terjadi proses analisis, klasifikasi, dan organisir dengan pengalaman individu yang dimiliki sebelumnya. Karena itu penyerapan itu bersifat individual berbeda satu sama lain meskipun dengan stimulus yang sama.
- b. Mengerti atau memahami yaitu indikator adanya persepsi sebagai hasil proses klasifikasi dan organisasi. Tahap ini terjadi dalam proses psikis.

c. Penilaian dan evaluasi

Setelah memahami objek maka individu akan membuat sebuah penilaian terhadap benda, atau sesuatu yang dipersepsikan.

Berdasarkan beberapa pendapat aspek dan indikator persepsi dinasti politik diatas, peneliti menggunakan indikator dari Walgito (1990) dan aspek dari Kemendikbud (dalam Mokodompit,2014) menyimpulkan bahwa indikator persepsi dinasti politik meliputi 1) penyerapan 2) pemahaman 3) penilaian karena sesuai dengan dinamika pada pemilih pemula.

D. Hubungan Kepercayaan Politik dan Persepsi Dinasti Politik Dengan Kecenderungan Golput Pada Pemilih Pemula Di Dalam Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilu dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu (Subangun, 2014).

Maka berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia minimal 17 tahun, dan mempunyai hak pilih. Dalam hal ini hak pilih berupa kartu tanda penduduk dan undangan untuk melakukan pemilihan umum. Selain itu pemilih pemula adalah pemilih yang belum pernah melakukan atau mengikuti pemilihan umum.

Secara psikologis, pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang tua. Pemilih pemula cenderung lebih kritis, mandiri, independen, anti status quo. Mereka cenderung tidak puas dengan kemapanan dan menginginkan perubahan. Dengan demikian, pilihan mereka juga sering tertuju pada partai politik atau tokoh yang pro perubahan. Karakter demikian memungkinkan mereka untuk menjadi pemilih yang rasional dalam menentukan pilihan (Sartana, 2014).Sartana (2014) membuat penelitian sikap memilih pemilih pemula yaitu :Sikap terhadap perhelatan pemilu 2014, hasilnya sebagian besar pemilih pemula lebih memilih menunggu informasi terkait pemilu dibanding mencari

informasinya sendiri. Hal ini karena banyaknya wakil rakyat yang terlibat korupsi sehingga mereka pesimis terhadap pemilu selanjutnya.

Sikap terhadap kampanye, sebagian besar (64 %) pemilih pemula enggan mengikuti kampanye kandidat. Mereka meyakini bahwa pada saat kampanye kandidat berusaha menampilkan sisi baiknya namun saat sudah terpilih mereka menjadi orang yang berbeda.

Sumber rujukan pemilih pemula, mayoritas (36%) pemilih pemula menjadikan tokoh sebagai pertimbangan untuk memilih. Responden berusaha melihat rekam jejak calon yang akan mereka pilih. Lingkungan sosial juga berpengaruh menurut mereka, mereka sering mendiskusikan calon yang akan dipilih dengan orangtua dan teman-temannya.

Dari temuan Sinarta (2014) diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap pemilih pemula adalah kurang peduli terhadap informasi pemilu, menentukan pilihan tidak berdasarkan keyakinan sendiri melainkan keyakinan yang berdasarkan informasi dari orang lain, memiliki persepsi negatif terhadap calon, dan memilih berdasarkan latar belakang calon tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku golput pada pemilih pemula dapat terjadi karena adanya persepsi negative yakni persepsi bahwa calon pemimpin tersebut akan meregenerasi jabatan politiknya dengan saudara sedarahnya kemudian melakukan kasus korupsi seperti rentetan kasus yang sudah terjadi.

Lantas mengapa persepsi negative itu muncul pada calon pemimpin padahal calon tersebut belum tentu melakukan kasus korupsi dalam meregenerasi suatu jabatan politiknya, hal itu karena menurut Chaplin (1999) persepsi secara umum bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar keadaan jiwa dan faktor motivasional. Penelitian lain mengenai persepsi dalam penentuan sikap golput dikuatkan dengan hasil penelitian Bawono (dalam Resha, 2013) yang menyatakan bahwa semakin baik persepsi terhadap pemilu maka perilaku pemilih akan semakin baik dalam partisipasinya.

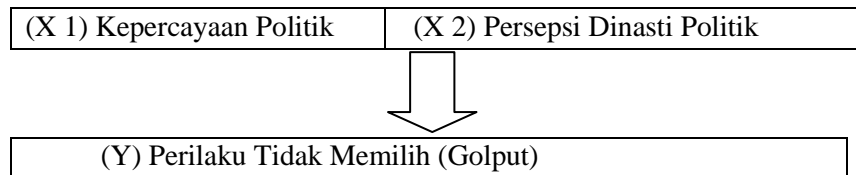
Selain persepsi dinasti politik kepercayaan politik juga diyakini sebagai faktor perilaku golput pemilih pemula. Menurut Hetherington,(1998) mengatan bahwa kepercayaan politik sebagai keyakinan rakyat terhadap kinerja pejabat publik maupun institusi pemerintahan. Artinya semakin yakin pemilih pemula pada kinerja pejabat politik maka akan bisa menumbuhkan rasa kepercayaan politik yang tinggi.

Maka berdasarkan penjabaran diatas dalam penelitian ini kepercayaan politik dan persepsi dinasti politik dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku golput merupakan faktor yang dipengaruhi.

Maka dalam penelitian ini digunakan kerangka berfikir sebagai berikut :

1. Hubungan kepercayaan politik dan perilaku golput
2. Hubungan persepsi dinasti politik dan perilaku golput

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :Hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung dapat dilihat pada skema berikut:



Keterangan

X1 : kepercayaan politik

X2 : persepsi dinasti politik

Y : perilaku golput

Hubungan Kepercayaan Politik Dan Persepsi Dinasti Politik Dengan Kecenderungan Golput

E. Hipotesis

Adapun uraian yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kepercayaan politik dan persepsi dinasti politik dengan perilaku golput pada pemilih pemula